

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang didasari oleh hukum yang kuat untuk mengatur para penduduknya. Dengan latar belakang negara berkembang, negara ini tentunya sangat memperhatikan penjaminan kehidupan yang makmur terhadap penduduknya agar status negara berkembang di negara Indonesia tetap terjaga dengan baik. Salah satu faktor untuk menjaga status negara berkembang dan penjaminan kehidupan yang makmur bagi para penduduknya adalah dengan membayar pajak, karena membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu manusia terhadap negara yang dihuninya.

Pengertian dari pajak itu sendiri adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh terhadap negara yang dihuninya, baik individu manusia maupun badan sesuai dengan Undang Undang yang telah diatur, bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan tujuan digunakan negara untuk memajukan kemakmuran rakyat. Salah satu pemasukan yang signifikan bagi keuangan negara adalah pajak itu sendiri, karena sebagian besar pendapatan negara dihasilkan dari pajak. Seiring berkembangnya zaman, pajak terus ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga pembangunan Nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri dengan prinsip kemandirian. Kesadaran akan kewajiban bayar pajak juga perlu ditingkatkan, karena pada kenyataannya samapai saat ini masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak, padahal dengan tidak membayar pajak tentu saja menjadi salah satu contoh tidak baik bagi sesama warga negara dan keuangan negara akan sangat terganggu, akibatnya

infrastruktur yang seharusnya bisa dikembangkan menjado terhambat. Indonesia menganut 3 system dalam pemungutan pajak, yaitu : *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With holding Tax System*, beberapa sytem tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistem pemungutan *Official Accessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, mennyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar.
3. *Withholding Tax* adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh salah satu pihak yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan Undang- Undang Perpajakan yang berlaku. Pihak yang ditunjuk berkewajiban untuk menghitung, memungut dan memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang dipungut atau dipotongnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Didalam sistem pemungutan *Withholding Tax* terdapat Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 23 ini adalah Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atas penyelenggaraan kegiatan lain yang selain dipotong oleh PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya .

Didalam Pajak Penghasilan Pasal 23, terdapat tarif yang sudah ditetapkan guna untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) dan 'ditaati oleh semua pihak terutama Badan Usaha yang bergerak dibidang Sewa dan Jasa.

Tarif dasar Pajak Penghasilan Pasal 23 ada dua macam, yaitu :

1. Tarif sebesar 15% : Tarif ini digunakan dari jumlah bruto atas dasar pembayaran Dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya.
2. Tarif sebesar 2% : Tarif ini digunakan dari jumlah bruto atas dasar pembayaran Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta, imbalan. Adapun dikenakan atas jasa antara lain : jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain – lain.

Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak kalah penting dengan pajak penghasilan lainnya, dan PT. Gading Murni Surabaya berperan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas Sewa dan Jasa yang dimiliki. PT. Gading Murni Surabaya merupakan salah satu perusahaan tertua yang ada di Surabaya, berdiri pada tahun 1948 yang awalnya bernama Le Even. Lalu seiring berkembang pesatnya penghasilan maka nama perusahaan tersebut berganti nama pada tahun 1960 menjadi PT. Gading Murni Surabaya, terletak pada Jalan Kembang Jepun Surabaya, perusahaan ini bergerak pada bidang Jasa atas penjualan alat – alat kantor, jasa bongkar muat barang, jasa pelayanan barang. Sebagai pemotong pajak, PT. Gading Murni Surabaya wajib melakukan pemotongan dan pelaporan atas penghasilan yang diterima dari jasa yang telah dikembangkan sesuai dengan peraturan Undang Undang Negara Republik

Indonesia. Penulisan Tugas akhir ini tidak lepas dari 2 referensi jurnal yang saya ambil, yaitu :

1. Tugas Akhir dari Anjas Wiliansyah yang berjudul ***“MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT PELINDO III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG” – 2017***
2. Tugas Akhir Nafadhila Eka Indriswari yang berjudul ***“PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI ELEKTRONIK (E-SPT) DI KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL” - 2018***

Mengenai berbagai hal dan alasan penulis memilih untuk meneliti lebih dalam mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 dikarenakan penulis tertarik dengan ruang lingkup Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah diajarkan didalam perkuliahan dan tentunya karena faktor yang menurut penulis lebih mudah mengambil penelitian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23, maka dari alasan tersebut pada akhirnya penulis memutuskan untuk mengangkat untuk dijadikan sebagai bahan Tugas Akhir. Mengenai hal tersebut penulis tidak lupa mencantumkan beberapa jenis riset data, referensi jurnal dan bukti-bukti lainnya yang penulis rangkum, maka penulis dapat menyimpulkan hasil dan bermaksud menyajikan Tugas Akhir sebagai tahap pengenalan lebih baik tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang notabannya sangat erat dengan lingkungan masyarakat, khususnya perusahaan, instansi pemerintah maupun jenis Badan Usaha yang berjudul ***“ANALISIS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. GADING MURNI SURABAYA”***

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Tujuan penulis melakukan Studi Lapang adalah memberikan manfaat atau menambah wawasan bagi penulis mengenai hal yang bersangkutan dengan Analisis Pelaporan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Selain itu dapat bermanfaat juga bagi perguruan tinggi yang penulis arungi, karena untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan Tugas Akhir dapat menjadikan sebagai referensi. Dan juga tidak lupa bagi perusahaan atau instansi (PT. GADING MURNI SURABAYA) yang diteliti dapat mendapat keuntungan yang tidak kalah banyak, salah satunya sebagai ajang promosi nama perusahaan, bisa dijadikan sebagai masukan sebagaimana mestinya yang bersangkutan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23.

## **1.3 Manfaat Studi Lapang**

### **1. Bagi Penulis**

Kegiatan studi lapang ini berguna untuk menambah wawasan penulis mengenai analisis pelaporan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Gading Murni Surabaya, serta menerapkan teori – teori yang selama ini sudah diperoleh maupun yang belum diperoleh pada bangku kuliah.

### **2. Bagi Perguruan Tinggi**

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dibidang perpajakan yang berjalan pada suatu perusahaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan pada buku lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

### 3. Bagi Perusahaan atau Instansi

Sebagai bahan masukan, khususnya yang berkaitan dengan analisis pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Gading Murni Surabaya.

#### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Agar pembahasan masalah ini tidak terlalu luas, maka penulis mengambil tindakan dengan cara membatasi pembahasan ini. Maka sehubungan dengan hal tersebut, penulis membahas mengenai Analisis Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Gading Murni Surabaya.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan agar peneliti mendapatkan bukti akurat untuk penelitian yang dikerjakan, metode ini sengaja dipilih oleh penulis karena sangat strategis dalam suatu penelitian. Penulis melakukan strategi pengumpulan data menggunakan beberapa metode, antara lain :

a) Wawancara : Metode ini digunakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada narasumber yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat pada PT. Gading Murni Surabaya. Adapun beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada perusahaan : Latar belakang perusahaan, asal usul perusahaan, seputar pajak penghasilan pasal 23, proses pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23, dan tentunya menanyakan batasan-batasan dokumen ataupun keperluan Tugas Akhir yang diizinkan perusahaan untuk digunakan sebagai bahan penulisan Tugas Akhir.

b) Observasi : Metode observasi ini peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana praktik lapangan yang digunakan oleh PT. GADING MURNI SURABAYA dalam melaporkan dan memotong pajak penghasilan pasal 23 dan juga agar bukti yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dipertanggung jawabkan dengan melihat langsung cara kerjanya.

c) Dokumentasi : Metode ini digunakan dalam penelitian berupa surat-surat, bulletin, bukti transaksi serta laporan yang memuat kejadian yang ada lapangan.

